

BAB I

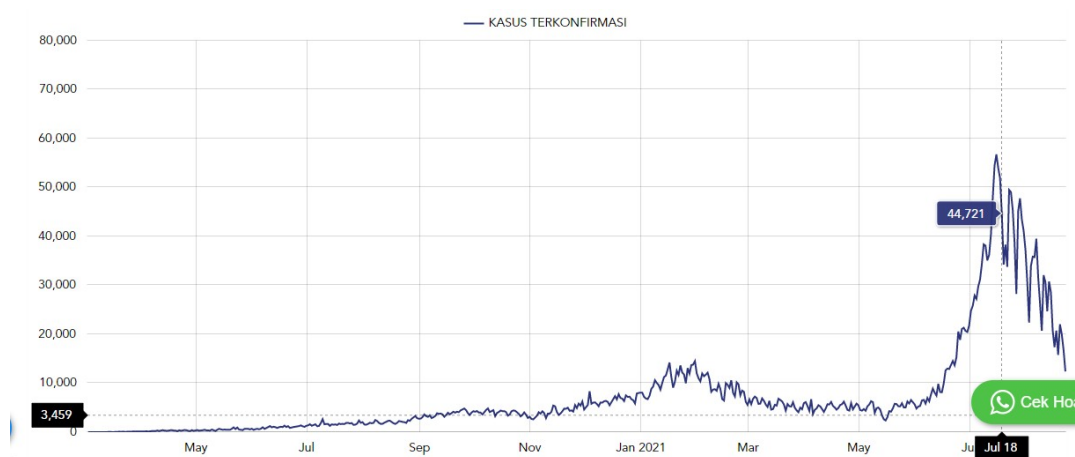
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan pencegahan dan penanggulangan pandemic Covid-19. Beberapa negara melakukan *Lockdown* secara penuh dengan membatasi kegiatan diluar rumah untuk seluruh masyarakat negaranya. Ada juga negara yang melakukan *Lockdown* terbatas dengan memperbolehkan beberapa warga masyarakat untuk berkegiatan diluar rumah seperti Brazil, Rusia, Amerika dan juga Indonesia. Terdapat sebagian kecil negara yang tidak melakukan *Lockdown* sama sekali seperti Korea Selatan dan Swedia.

Angka kasus penyebaran virus *covid-19* di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap harinya sejak ditemukan kasus pertama, sebagaimana data yang ditunjukkan pada gambar 1.1 yang dapat dilihat setiap harinya melalui Covid19.go.id.

Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Terkonfirmasi Agustus 2021

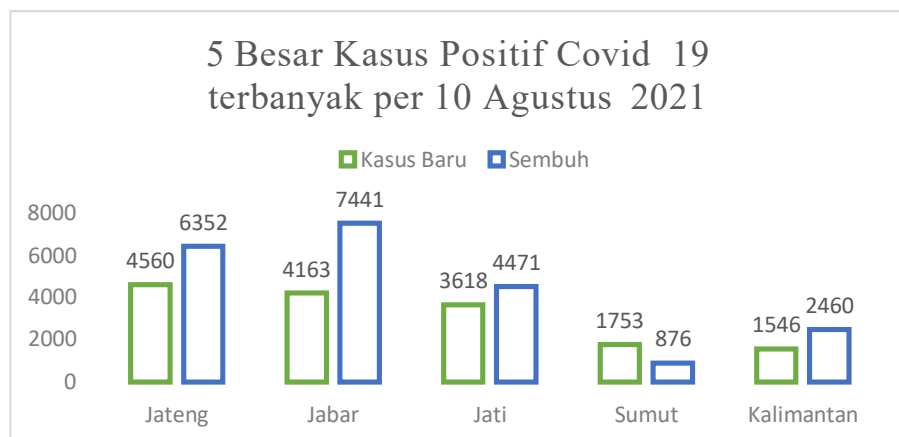


Sumber: covid19.go.id

Data harian sebaran *Covid-19* pertanggal 10 Agustus 2021 mencatat

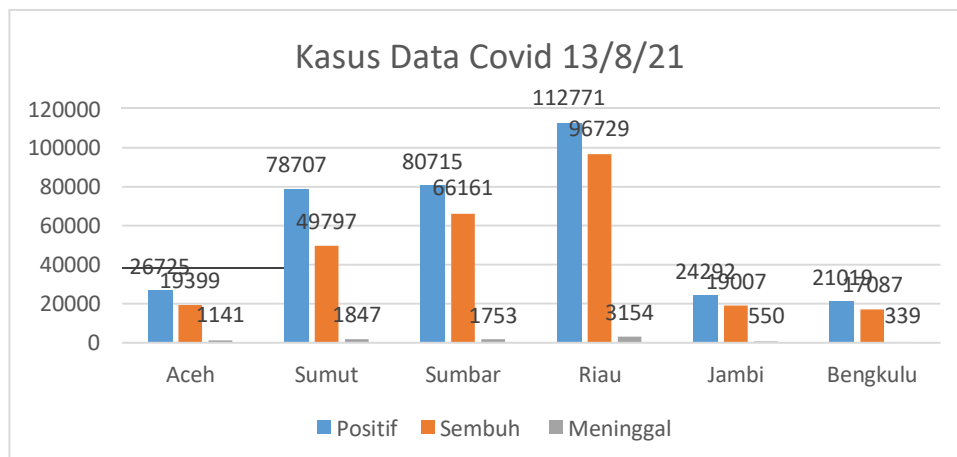
Sumatera Utara menjadi salah satu penyumbang tertinggi dari lima kota besar yang ada di Indonesia. Gambar 1.1 menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus baru dari 32.081 dan jika diakumulasikan kasus positif Covid pada tanggal 10 Agustus 2021 menjadi 3.718.821 dari lima kota besar yaitu Jawa tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Kalimantan.

Gambar 1.2 Lima kota terbanyak kasus positif COVID 19



Sumber: <https://www.liputan6.com>

Gambar 1.3 Update Covid-19 Pulau Sumatera



Sumber: regional.kompas.com

Jumlah kasus positif covid yang tinggi di Sumatera Utara membuat pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tujuan untuk membatasi kegiatan masyarakat

terutama mengurangi kerumuman. Indonesia pernah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dimulai pada tanggal 10 April 2020 dan dimulai oleh Provinsi DKI Jakarta kemudian dilanjutkan oleh Provinsi lainnya. Untuk pemberlakuan PSBB ada tertulis dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan pembatasan social berskala besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang yakni 14 hari. Jika masi terbukti penyebarannya maka dapat diperpanjang selama 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Penetapan PSBB dilakukan jika ada permohonan dari Gubernur/Walkikota/Bupati atau ketua Gugus Tugas penanganan *Covid-19*. Adapun permohonan itu harus disertai dengan data peningkatan jumlah dan penyebaran kasus menurut waktu serta kejadian transmisi lokal. Selain itu masing – masing daerah juga harus menyampaikan informasi terkait kesiapan daerah, seperti aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasara kesehatan anggaran serta operasional jaring pengaman sosial dan aspek keamanan (indonesiabaik.id).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan beberapa aturan dalam penanganan penyebaran virus *Covid-19*. Peraturan Nomor 440/2666/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 2020 menginstruksikan seluruh sekolah untuk mengadakan belajar mandiri di rumah dan menginstruksikan seluruh orang tua siswa dan tenaga pendidik mengawasi kegiatan peserta didik dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan.

Pemerintah merubah sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam

memberikan Pelayanan Publik selama pandemi (kemenkumham.go.id). Perubahan sistem kerja bagi ASN bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran *Covid-19*. Pemerintah mengambil kebijakan *Work From Home* (WFH) bagi ASN. Meski bekerja dari rumah, bukan berarti para pegawai Aparatur Sipil Negara libur dalam memberikan pelayanan publik, namun mereka tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi Informasi. Perubahan sistem kerja ini tentunya menghadapi pro dan kontra sehingga pada proses pelaksanaannya masih belum bisa maksimal.

Berdasarkan surat edaran Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata cara penilaian kinerja pegawai negeri sipil tahun 2021 yang bersumber dari peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil pasal 4 menyatakan penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip: objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Sistem manajemen kinerja PNS yang tertulis dalam permen tersebut terdiri atas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, kemudian adanya penilaian kinerja dan sistem informasi kinerja PNS. Hal ini masih sesuai dengan Permen PANRB No.8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Kebijakan WFH menimbulkan permasalahan bagi perusahaan dan instansi pemerintah karena masih banyak tenaga kerja dan perusahaan yang masih belum siap beradaptasi dengan situasi dan teknologi yang baru (Purwanto, 2020). Banyak instansi pemerintah yang belum memiliki data yang sudah terintegrasi secara online, sehingga ketika ASN membutuhkan data, mereka tetap harus mengambil dalam bentuk fisik ke kantor (Krisyohana, 2020). Pada akhirnya membuat

pelayanan publik menjadi tidak maksimal karena sistem yang ada belum mendukung untuk pelaksanaan pelayanan secara daring.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah komunikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpengaruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara?
3. Faktor-faktor apa yang menghambat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja ASN saat WFH pada masa pandemi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap kinerja ASN saat WFH pada masa pandemi
3. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.